



Implementasi Program Padat Karya Produksi Paving dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan (Studi di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur)

Divarelia Fernanda^{1*}, Radjikan², Muhammad Roisul Basyar²

^{1,2,3} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : Divafernanda24@gmail.com¹, radjikan@untag-sby.ac.id², roisulbasyar@untag-sby.ac.id³

Alamat : Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya

Korespondensi Penulis : divafernanda24@gmail.com

Abstract. *The Padat Karya (Labor-Intensive) Program is one of the strategies implemented by the Surabaya City Government to reduce poverty through local economic empowerment. This study aims to analyze the implementation of the Paving Production Padat Karya Program in Siwalankerto Sub-District, Wonocolo District, Surabaya City. The research used a descriptive qualitative approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The analysis was based on Van Meter and Van Horn's policy implementation model, which includes six indicators: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agents, social-economic-political environment, and disposition of implementers. The findings indicate that the program has not been implemented optimally. There is a lack of measurable operational indicators, limited available resources, and ineffective inter-agency coordination. Moreover, the absence of a dedicated implementation unit and weak affirmative policy support have hindered the program's sustainability. Both implementers and participants tend to be passive due to the lack of tangible economic outcomes. The study recommends strengthening institutional frameworks, improving capacity, and developing affirmative market-based policies to ensure the program's sustainability.*

Keywords: Policy Implementation, Labor-Intensive Program For Paving Production, Poverty, Surabaya

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Padat Karya Produksi Paving di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya sebagai upaya mengatasi kemiskinan dengan pendekatan kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Dengan menerapkan metode kualitatif deskriptif dan teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn, studi ini menilai 6 indikator dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan sikap pelaksana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program ini cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan penduduk yang miskin dan menciptakan peluang kerja, meskipun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan dalam alat produksi dan pemasaran yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan teknis dan pengembangan pasar untuk meningkatkan efektivitas program secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Padat Karya Produksi Paving, Kemiskinan, Surabaya

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan mutlak atau relatif di suatu wilayah di mana individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai dengan norma atau standar yang berlaku. Dalam hal ekonomi, kemiskinan menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan membeli yang rendah dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi (Nugroho dan Dahuri, 2012).

Kemiskinan di Indonesia adalah isu yang perlu segera diselesaikan, di mana tujuan untuk menghapuskan kemiskinan ini adalah salah satu visi negara Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa keberadaan negara ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah yang rumit yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan lain, seperti meningkatnya tingkat kriminalitas, kualitas pendidikan yang rendah, masalah kesehatan, dan sebagainya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kemiskinan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar baik pangan maupun non-pangan yang diukur berdasarkan pengeluaran.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, populasi di Indonesia per Juni 2023 tercatat sebanyak 1278.696,2 jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan dari bulan September 2012 hingga Maret 2023 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, baik sebelum maupun setelah pandemi Covid-19. Profil mengenai jumlah serta tingkat kemiskinan antara tahun 2012 dan 2023 yang sedang terjadi di Indonesia dapat diamati pada grafik dari berita resmi statistik No. 47/07/Th. XXVI, 1 Juli 2024 di bawah ini:



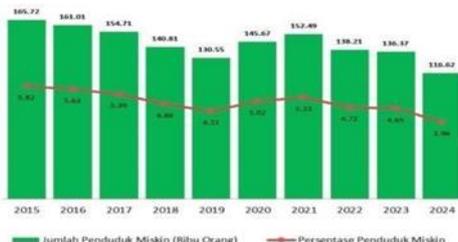
Gambar 1. Kemiskinan Di Indonesia 2024

Sumber/*Source*: BPS Indonesia 2024

Dari gambar 1. di atas, terlihat bahwa selama rentang waktu dari Maret 2019 hingga September 2019, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun sebesar 0,36% atau setara dengan 24,78 juta orang. Namun, antara Maret 2020 dan September 2020, tingkat kemiskinan justru meningkat hingga 1,13% atau sekitar 27,55 juta orang, yang diakibatkan oleh munculnya pandemi Covid-19 ke Indonesia. Meski begitu, pada Maret 2024, angka kemiskinan kembali menunjukkan penurunan hingga mencapai 9,03 juta. Selain itu, terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya mutu tenaga kerja menyebabkan semakin banyak orang kehilangan peluang pekerjaan, yang selanjutnya memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di negeri ini. Terlebih lagi, pasca terjadinya pandemi Covid-19, banyak negara mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebut berdampak pada banyak pekerja di berbagai sektor, terutama di

kalangan buruh pabrik dan buruh swasta, yang kehilangan pekerjaan dan terpaksa menjadi pengangguran.

Permasalahan terkait kemiskinan dan pengangguran cukup umum terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Contohnya, di Surabaya, yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Surabaya masih cukup tinggi.



Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Kota Surabaya 2024

Sumber/Source: BPS 2024

Meskipun demikian, angka tersebut tetap tinggi untuk ukuran kota maju. Selain kemiskinan, angka pengangguran terbuka juga masih menjadi isu strategis. Berdasarkan data BPS, berikut adalah tren pengangguran terbuka di Surabaya,

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Pengangguran Terbuka Di Kota Surabaya

Tahun	Jumlah Pengangguran	Persentase pengangguran
2020	1,58 Juta	9,79 %
2021	1,57 Juta	9,68 %
2022	1,64 Juta	7,62 %
2023	1,57 Juta	6,76 %

Sumber/Sumber: BPS Surabaya 2023

Untuk menanggulangi persoalan ini, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan berbagai kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui Program Padat Karya. Program ini tidak hanya bertujuan menciptakan lapangan kerja sementara, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat miskin melalui pelatihan dan dukungan usaha. Salah satu bentuk konkrit program tersebut adalah Program Padat Karya Produksi Paving, yang mulai diimplementasikan pada tahun 2022. Hingga Triwulan III 2024, terdapat 102 lokasi usaha padat karya aktif di Kota Surabaya yang tersebar di berbagai kecamatan. Berikut adalah tabel jumlah pekerja dalam Produksi Paving di Kota Surabaya, yang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Kelompok Padat Karya Produksi Paving Masyarakat Di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Jumlah Peserta
1.	Tambaksari	50
2.	Semampir	14
3.	Kenjeran	35
4.	Genteng	1
5.	Sukolilo	7
6.	Pakal	12
7.	Sawahan	2
8.	Bubutan	1
9.	ASemrowo	1
10.	Benowo	16
11.	Dukuh Pakis	1
12.	Gubeng	23
13.	Wonokromo	17
14.	Mulyorejo	5
15.	Wonocolo	10
16.	Gunung Anyar	14
17.	Sukomanunggal	17
18.	Tegalsari	1
19.	Gayungan	9

Sumber/Source: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (2024)

Di tahun 2023 pemerintah menambahkan satu unit padat karya produksi paving yaitu di Kelurahan Siwalankerto. Program padat karya produksi paving ini inisiatif yang diusung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengurangi dan mengatasi kemiskinan di Kota Surabaya. Namun, menurut berita yang tersebar dimedia sosial, program padat karya di Kelurahan Siwalankerto masih belum sepenuhnya berhasil jika dibandingkan dengan Program Padat Karya Produksi Paving di Kecamatan atau Kelurahan lainnya.



Gambar 3. Berita Program Padat Karya

Sumber : detiknews(2023)

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, mengatakan bahwa Program Padat Karya Paving ini memerlukan pandampingan, dan inovasi yang harus dikembangkan, agar para pekerja bisa segera menghasilkan, mengingat program ini lebih mengangkat ekonomi Gakin (Warga Miskin). Dan mereka hanya mampu memproduksi 12-13 meter setiap harinya, dan produksi paving tersebut masih belum bisa dipasarkan. Terkait dengan berita yang telah disampaikan diatas, penulis ingin melakukan penelusuran tentang penelitian yang membahas implementasi Program Padat Karya (PPK) Produksi Paving yang berada di Kota Surabaya dengan urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui atau memahami sejauh mana implementasi dari program Padat Karya ini dapat mengatasi kemiskinan di Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Siwalankerto dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Padat Karya Produksi Paving di Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Kelurahan Siwalankerto dipilih sebagai salah satu lokasi penelitian karena program Padat Karya Produksi Paving Di Kelurahan Siwalankerto ini menghadapi tantangan yang menghambat keberhasilannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana implementasi Program Padat Karya Produksi Paving dalam upaya mengatasi kemiskinan di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Kedua, apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan program tersebut sehingga memengaruhi efektivitas pencapaian tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Padat Karya Produksi Paving di Kelurahan Siwalankerto dan mengevaluasi efektivitas program tersebut dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi program dalam konteks sosial, ekonomi, maupun kelembagaan lokal.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan padat karya berbasis komunitas. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Padat Karya Produksi Paving, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara konkret melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian Implementasi kebijakan adalah proses yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan, karena berkaitan dengan realisasi kebijakan yang telah dirumuskan untuk memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Salah satu pendekatan teoretis yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik adalah model yang dikemukakan oleh Van Metter Van Horn. Van Metter Van Horn berpendapat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh 6 indikator yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi antar Badan Pelaksana
4. Karakteristik Badan Pelaksana
5. Sikap Pelaksana

Kerangka teori ini berperan sebagai instrumen analisis utama dalam penelitian untuk memahami pelaksanaan program padat karya produksi paving di Kelurahan Siwalankerto. Dengan merujuk pada indikator yang telah dirumuskan oleh Van Metter Van Horn, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Padat Karya Produksi Paving Di Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan program padat karya produksi paving ini. Sesuai dengan penelitian sebelumnya, berbagai hasil dari studi terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sasaran, fasilitas yang memadai, serta dukungan politik dan administratif yang memadai. Dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rizky Hidayat (2025) mengenai program padat karya produksi paving di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, ditemukan bahwa fasilitas yang ada masih kurang memadai dan partisipasi masyarakat juga lemah. Hasil temuan ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat miskin serta ketersediaan sumber daya yang memadai dalam proses pelaksanaan program ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana Program Padat Karya Produksi Paving dilaksanakan di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Metode ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk mengamati dinamika kebijakan dan pengalaman individu yang terlibat, sesuai dengan konteks dan realitas yang ada, tanpa mengubah variabel atau keadaan yang sedang diamati.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Padat Karya Produksi Paving, baik sebagai pelaksana maupun penerima kebijakan. Sampel penelitian dipilih dengan metode purposive, berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Informan terdiri dari Staff Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Staff Kecamatan Wonocolo Seksi Kesejahteraan dan Perekonomian, Lurah dari Kelurahan Siwalankerto, Ketua Program Padat Karya Produksi Paving, serta tiga peserta dari Program Padat Karya.

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis, yang meliputi:

1. Wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur, bertujuan untuk mengeksplorasi informasi dari berbagai perspektif para aktor kebijakan.
2. Observasi partisipatif, untuk melihat secara langsung pelaksanaan program di lapangan.
3. Dokumentasi, yang mencakup data dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta catatan selama wawancara dan dokumentasi lokasi produksi paving di lapangan.

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah panduan wawancara yang dirancang berdasarkan indikator teori pelaksanaan kebijakan dari Van Metter Van Horn. Keberlakuan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yang meliputi perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumen secara bersamaan untuk memastikan kebenaran dan keotentikan informasi.

Adapun analisis informasi yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) yang meliputi tiga langkah utama:

1. Reduksi informasi, yaitu tahapan pemilihan, penyederhanaan, dan penekanan pada data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, dalam bentuk narasi, gambar, dan kutipan langsung dari narasumber yang disusun secara tematik.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan hasil temuan secara logis dan sistematis berdasarkan pola-pola yang muncul selama analisis.

Model penelitian ini tidak menerapkan rumus statistik kuantitatif, karena fokusnya adalah pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial serta kebijakan yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, hasil yang diperoleh berupa penjelasan naratif yang menekankan interpretasi mendetail terkait pelaksanaan kebijakan secara nyata di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat miskin.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Siwalankerto yang merupakan tempat dari program padat karya produksi paving ini berlangsung. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan program padat karya produksi paving. Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan 6 indikator dalam teori implementasi kebijakan menurut Van Metter Van Horn, yaitu Standar Dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik, Sikap Pelaksana. Penyajian ini bertujuan untuk menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teori untuk mendapatkan interpretasi yang menyeluruh.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar serta sasaran atau tujuan menjadi fokus utama, yang jelas harus berlandaskan pada kebijakan operasional. Dengan kata lain, penetapan kinerja itu sendiri adalah proses pelaksanaan kebijakan dan dari kinerja ini kita juga bisa mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah yang mendasari serta tujuan kebijakan dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian Program Padat Karya Produksi Paving di Kelurahan Siwalankerto merupakan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Perwali No. 83 Tahun 2023. Tujuannya adalah memulihkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja bagi keluarga miskin. Program ini melibatkan warga miskin secara langsung dalam pelatihan dan produksi paving block, dengan hasil produksi dibeli oleh pemerintah. Pelaksanaan program ini sudah mengikuti standar dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini, kelurahan berperan penting dalam menentukan sasaran program dengan memanfaatkan data warga miskin yang dimilikinya, sehingga memastikan bahwa program tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Salah satu peserta program bahkan melaporkan penghasilan hingga Rp 4 juta per bulan. Melalui fasilitasi produksi paving block yang hasilnya dibeli oleh Pemerintah Kota Surabaya, program ini memberikan penghasilan tambahan bagi warga miskin. Keterlibatan warga miskin sebagai pekerja dalam program ini menunjukkan bahwa sasaran program telah tercapai.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, bersama dengan dana dan peralatan. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa sumber daya seperti dana dan insentif sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam program Pembangunan Paving di Surabaya, tenaga kerja diambil dari masyarakat miskin yang telah diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan

mereka. Program ini memiliki dua kelompok, yaitu Siwalan Berkah dan Jemur Berkah, dan dapat menghasilkan 25–30m² paving setiap harinya. Para pekerja menerima penghasilan tetap sekitar 3–4 juta rupiah per bulan melalui sistem pinjaman koperasi untuk bahan baku, dengan gaji yang dibayarkan secara tepat waktu. Dinas menyediakan mesin press dan mixer, yang dirawat oleh para pekerja. Namun, peralatan produksi ini sering mengalami kerusakan. Meski begitu, program ini dianggap berhasil dalam upaya mengurangi kemiskinan, meskipun saat ini produk paving hanya dijual kepada Pemerintah Kota Surabaya dan masalah peralatan produksi yang kerap muncul.

3. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Menurut pandangan Van Meter dan Van Horn, komunikasi antara organisasi memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam Program Padat Karya Produksi Paving di Siwalankerto, interaksi dan kerjasama antara DSDABM, kecamatan, kelurahan, dan koperasi berjalan dengan baik melalui pertemuan secara langsung maupun melalui media seperti telepon dan WhatsApp. Pengawasan secara berkala yang dilakukan DSDABM juga memberikan dukungan pada pelaksanaan program. Dengan adanya komunikasi dan kerjasama yang efektif, program ini dapat dilakukan dengan efisien untuk membantu mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Menurut teori Van Meter dan Van Horn, karakteristik badan pelaksana berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam studi implementasi Program Padat Karya Produksi Paving di Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, kemampuan, struktur, dan komitmen lembaga pelaksana menjadi indikator utama efektivitas program. Kinerja dan peran kelurahan dan kecamatan, serta koordinasi dengan dinas mencerminkan kesiapan pelaksana dalam menjalankan tugas. Tim Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang mengawasi program padat karya paving memiliki pengalaman yang cukup. Keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi, sehingga memungkinkan kegiatan dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Pengalaman yang berkembang sejak dimulainya program ini menjadi hal yg penting dalam pengelolaan program. Struktur organisasi serta sistem komunikasi badan pelaksana menunjukkan ciri-ciri yang sangat positif. Tugas dilakukan dengan jelas dan sistematis sesuai dengan fungsi masing-masing, yang menciptakan koordinasi yang efektif.

5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Program padat karya produksi paving di Kelurahan Siwalankerto ini mendapatkan dukungan besar dari berbagai pihak, terutama masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam kondisi sosial, partisipasi masyarakat sangat aktif dan antusias. Mereka yang sebelumnya memiliki penghasilan tidak tetap merasa terbantu dengan program ini karena kini mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang memberinya pendapatan yang tetap. Hal ini dapat dilihat dari dampak positif para pekerja yang mengaku sekarang memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan ada yang mampu membiayai pendidikan anaknya.

6. Sikap Pelaksana

Menurut pandangan Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustinus (2006): “sikap menerima atau menolak dari pelaksana kebijakan memiliki dampak besar terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan publik.” Sikap para pelaksana terhadap program ini sangat mendukung dan optimis. Mereka menunjukkan komitmen yang tinggi demi kesuksesan program ini, terutama karena program ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di daerah tersebut. Pelaksana, seperti camat, lurah, serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, sangat responsif dan terlibat dalam mendukung pelaksanaan program ini. Mereka tidak hanya membantu menghadapi kendala yang ada, tetapi juga secara teratur memantau proses produksi paving agar berjalan dengan baik.

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implelementasi Program Padat Karya Produksi Paving Di Kelurahan Siwalankerto ini

a) Faktor Pendukung :

Berdasarkan temuan penelitian, faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program ini adalah program padat karya untuk produksi paving yang didasarkan pada hukum yang solid serta data dari kelurahan yang ditujukan untuk keluarga kurang mampu. Keterlibatan masyarakat yang kurang beruntung, pengangguran, dan pekerja dengan pendapatan rendah memperoleh pelatihan dan penghasilan antara Rp 3–4 juta setiap bulannya. Sistem keuangan koperasi yang terbuka memastikan pembayaran upah dilakukan tepat waktu. Koordinasi secara berkala serta pengawasan dari pihak kecamatan dan kelurahan memastikan kelancaran dan mutu produksi tetap terjaga.

b) Faktor Penghambat

Implementasi program padat karya untuk produksi paving ini juga mengalami kendala dalam pelaksanaannya, terutama akibat kerusakan pada alat produksi yang dapat mengganggu kelancaran proses. Meskipun perbaikan alat dapat dilakukan dengan cepat, keterlambatan dalam penanganan memberikan dampak negatif. Diperlukan respons yang cepat serta pemeliharaan secara berkala. Di samping itu, pemasaran produk masih terbatas karena kapasitas produksi yang rendah. Saat ini, paving hanya dibeli oleh Pemerintah Kota Surabaya, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas dan perbaikan alat agar produksi dan pemasaran dapat berkembang dengan lebih luas dan efisien.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Program Padat Karya Paving di Kelurahan Siwalankerto, Surabaya dianggap berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran dengan melibatkan masyarakat kurang mampu sebagai pekerja dalam pembuatan paving block. Program ini menyediakan pendapatan tetap sekitar Rp 3–4 juta per bulan serta pelatihan teknis untuk produksi paving, sehingga para peserta mendapatkan keterampilan yang dapat bermanfaat untuk peluang usaha mandiri di kemudian hari.

Program Padat Karya Produksi Paving ini didukung oleh kerjasama yang efektif, pengawasan dari pemerintah, pelatihan keterampilan, serta pembayaran upah yang tepat waktu. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti peralatan produksi yang kurang memadai dan pemasaran yang terbatas hanya pada pihak pemerintahan kota. Untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pasar, diperlukan lebih banyak perhatian terhadap peralatan serta perluasan akses ke sektor swasta.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah perlu melaksanakan manajemen dan pemeliharaan alat-alat produksinya serta melakukan perawatan secara berkala dan perbaikan cepat agar proses produksi tidak terganggu, termasuk menyediakan pelatihan teknis untuk karyawan mengenai perawatan alat. Pemerintah bisa menyediakan anggaran untuk membeli mesin cetak paving block yang lebih efektif dan mempunyai kemampuan produksi yang besar. Contohnya, mesin press paving block otomatis yang mampu meningkatkan jumlah produksi serta menjaga kualitas yang konsisten. Selain itu, pemerintah sebaiknya juga mempromosikan produk paving tidak hanya kepada pemerintah daerah tetapi juga kepada sektor swasta dan masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Surabaya dalam angka 2023*. BPS Kota Surabaya.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil kemiskinan di Indonesia September 2024*. BPS Indonesia.
- Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya. (2024). *Data kelompok padat karya paving Kota Surabaya*. Pemerintah Kota Surabaya.
- Ilmu, S., Administrasi Negara, Fakultas Ilmu, & Ilmu Politik. (2025). Implementasi program padat karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, 8(1). (*Catatan: penulis dan jurnal tidak jelas, mohon verifikasi ulang nama jurnal dan institusi penerbit*)
- Maharima, A. N. (2024). Implementasi program rumah padat karya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. *Journal of Politic and Government Studies*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/45179>
- Manembu, R. R. (2019). Padat karya sebagai kontribusi kehidupan masyarakat pada penggunaan dana desa (Studi kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan). *Holistik*, 12(2), 1–21.
- Model, B., & Korten, D. C. (2024). Implementasi program padat karya dalam pengurangan pengangguran di Kota Surabaya: Sebuah analisis. 6(1), 91–100. (*Catatan: Nama jurnal tidak disebutkan, perlu dilengkapi*)
- Nasution, A. S., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(1), 11–25.
- Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Padat Karya Produksi Paving.
- Rumana, M. Z., Puspaningtyas, A., & Hariyoko, Y. (2024). Evaluasi kebutuhan Wira Wiri Suroboyo sebagai transportasi publik Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(4), 154–187. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i04.1602>
- Sari, Y. W., & Meirinawati, M. (2024). Strategi program padat karya oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Studi proyek padat karya paving Tambaksari Surabaya). *Publika*, 12(1), 292–307. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p292-307>
- Septiani, N. I. (2024). Program rumah padat karya produksi paving sebagai upaya pengentasan kemiskinan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (JPPM)*, 11(1), 37–59. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jppm>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>